

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI,
DAERAH KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001, Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah telah melakukan penghitungan Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2005;
- b. bahwa perhitungan Dana Alokasi Umum tersebut pada huruf a dilakukan dengan memperhatikan Hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2005 pada tanggal 22 September 2004;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan huruf b, Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2005, perlu ditetapkan dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2005.

BAB I
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Umum terdiri dari:
 - a. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi;
 - b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Besarnya Dana Alokasi Umum untuk Tahun Anggaran 2005 ditetapkan 25,5% (dua puluh lima koma lima persen) dari Penerimaan Dalam Negeri Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 setelah dikurangi dengan Penerimaan Negara yang dibagihasilkan kepada Daerah dan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi.
- (3) Besaran Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Daerah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2);
 - b. Untuk Daerah Kabupaten/Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2).

BAB II
PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 2

- (1) Perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001.
- (2) Penghitungan Dana Alokasi Umum suatu Daerah juga

mempertimbangkan Faktor Penyeimbang dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan Daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang menjadi tanggung jawab Daerah.

- (3) Faktor Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Alokasi Dasar kepada Daerah yang dihitung berdasarkan lumpsum dan berdasarkan proporsi beban belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2004.

Pasal 3

Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk 64 (enam puluh empat) Daerah otonom baru yang merupakan hasil pemekaran Tahun 2002 dan Tahun 2003, dilakukan dengan membagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan beban kebutuhan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Dana Alokasi Umum daerah induknya.

Pasal 4

- (1) Hasil perhitungan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, ditetapkan berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- (2) Rincian Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada masing-masing Daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) Gubernur melaporkan penggunaan Dana Alokasi Umum setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan penggunaan Dana Alokasi Umum setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM DAERAH
PROVINSI, DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2005

(dalam jutaan rupiah)

No.	Daerah	Jumlah
I	Prov. NAD	271.147
1	Kabupaten Aceh Barat	139.496
2	Kabupaten Aceh Besar	192.200
3	Kabupaten Aceh Selatan	145.661
4	Kabupaten Aceh Singkil	117.849
5	Kabupaten Aceh Tengah	120.251
6	Kabupaten Aceh Tenggara	149.207
7	Kabupaten Aceh Timur	159.002
8	Kabupaten Aceh Utara	199.896
9	Kabupaten Bireuen	183.713
10	Kabupaten Aceh Pidie	242.139
11	Kabupaten Simeuleu	105.355
12	Kota Banda Aceh	160.363
13	Kota Sabang	92.661
14	Kota Langsa	104.780
15	Kota Lhokseumawe	108.124
16	Kabupaten Nagan Raya	116.281
17	Kabupaten Aceh Jaya	100.016
18	Kabupaten Aceh Barat Daya	103.201
19	Kabupaten Gayo Lues	112.152
20	Kabupaten Aceh Tamiang	120.685
21	Kabupaten Bener Meriah	57.692
II	Provinsi Sumatera Utara	313.745
1	Kabupaten Asahan	292.231
2	Kabupaten Dairi	138.511
3	Kabupaten Deli Serdang	330.429
4	Kabupaten Tanah Karo	194.397
5	Kabupaten Labuhan Batu	286.548
6	Kabupaten Langkat	293.755
7	Kabupaten Mandailing Natal	183.019
8	Kabupaten Nias	172.962
9	Kabupaten Simalungun	313.639
10	Kabupaten Tapanuli Selatan	265.560
11	Kabupaten Tapanuli Tengah	153.475

12	Kabupaten Tapanuli Utara	149.607
13	Kabupaten Toba Samosir	108.378
14	Kota Binjai	140.594
15	Kota Medan	426.572
16	Kota Pematang Siantar	149.682
17	Kota Sibolga	101.569
18	Kota Tanjung Balai	106.177
19	Kota Tebing Tinggi	114.202
20	Kota Padang Sidempuan	128.044
21	Kabupaten Pakpak Bharat	43.399
22	Kabupaten Nias Selatan	82.051
23	Kabupaten Humbang Hasundutan	83.584
24	Kabupaten Serdang Berdagai	188.714
25	Kabupaten Samosir	62.082
III	Provinsi Sumatera Barat	247.487
1	Kabupaten Limapuluh Koto	179.246
2	Kabupaten Agam	204.252
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	110.806
4	Kabupaten Padang Pariaman	197.236
5	Kabupaten Pasaman	115.592
6	Kabupaten Pesisir Selatan	206.774
7	Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	107.707
8	Kabupaten Solok	151.940
9	Kabupaten Tanah Datar	182.326
10	Kota Bukit Tinggi	110.632
11	Kota Padang Panjang	93.129
12	Kota Padang	287.033
13	Kota Payakumbuh	119.970
14	Kota Sawahlunto	89.637
15	Kota Solok	94.643
16	Kota Pariaman	95.973
17	Kabupaten Pasaman Barat	109.228
18	Kabupaten Dharmasraya	71.212
19	Kabupaten Solok Selatan	62.813
IV	Provinsi Riau	92.157
1	Kabupaten Bengkalis	206.723
2	Kabupaten Indragiri Hilir	203.823
3	Kabupaten Indragiri Hulu	162.264
4	Kabupaten Kampar	185.109
5	Kabupaten Kuantan Singingi	118.228
6	Kabupaten Pelalawan	109.947
7	Kabupaten Rokan Hilir	91.848
8	Kabupaten Rokan Hulu	104.146
9	Kabupaten Siak	95.609
10	Kota Dumai	93.479
11	Kota Pekanbaru	171.345
V	Provinsi Riau Kepulauan	25.963

1	Kabupaten Kepulauan Riau	85.225
2	Kabupaten Natuna	147.584
3	Kabupaten Karimun	122.891
4	Kota Batam	125.831
5	Kota Tanjung Pinang	100.315
6	Kabupaten Lingga	46.333
VI	Provinsi Jambi	243.618
1	Kabupaten Batanghari	145.487
2	Kabupaten Bungo	164.996
3	Kabupaten Kerinci	193.116
4	Kabupaten Merangin	169.898
5	Kabupaten Muaro Jambi	143.794
6	Kabupaten Sarolangun	139.535
7	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	133.439
8	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	130.807
9	Kabupaten Tebo	142.287
10	Kota Jambi	198.220
VII	Provinsi Sumatera Selatan	242.707
1	Kabupaten Lahat	206.384
2	Kabupaten Musi Banyuasin	145.336
3	Kabupaten Musi Rawas	201.781
4	Kabupaten Muara Enim	187.293
5	Kabupaten Ogan Komering Ilir	244.152
6	Kabupaten Ogan Komering Ulu	134.240
7	Kota Palembang	351.714
8	Kota Pagar Alam	92.469
9	Kota Lubuk Linggau	104.057
10	Kota Prabumulih	87.906
11	Kabupaten Banyuasin	210.948
12	Kabupaten Ogan Ilir	93.165
13	Kabupaten OKU Timur	128.782
14	Kabupaten OKU Selatan	83.203
VIII	Provinsi Bangka Belitung	187.358
1	Kabupaten Bangka	95.112
2	Kabupaten Belitung	88.920
3	Kota Pangkal Pinang	108.718
4	Kabupaten Bangka Selatan	56.695
5	Kabupaten Bangka Tengah	49.070
6	Kabupaten Bangka Barat	55.370
7	Kabupaten Belitung Timur	63.902
IX	Provinsi Bengkulu	230.653
1	Kabupaten Bengkulu Selatan	92.904
2	Kabupaten Bengkulu Utara	166.265
3	Kabupaten Rejang Lebong	118.963
4	Kota Bengkulu	167.655
5	Kabupaten Banyuasin	65.711

6	Kabupaten Seluma	88.328
7	Kabupaten Mukomuko	84.811
8	Kabupaten Lebong	52.396
9	Kabupaten Kepahiang	42.642
X	Provinsi Lampung	300.878
1	Kabupaten Lampung Barat	165.705
2	Kabupaten Lampung Selatan	337.196
3	Kabupaten Lampung Tengah	331.429
4	Kabupaten Lampung Utara	225.963
5	Kabupaten Lampung Timur	282.847
6	Kabupaten Tanggamus	285.091
7	Kabupaten Tulang Bawang	224.124
8	Kabupaten Way Kanan	154.732
9	Kabupaten Bandar Lampung	264.151
10	Kota Metro	121.947
XI	Provinsi DKI Jakarta	768.080
XII	Provinsi Jawa Barat	495.604
1	Kabupaten Bandung	802.830
2	Kabupaten Bekasi	284.954
3	Kabupaten Bogor	603.964
4	Kabupaten Ciamis	432.352
5	Kabupaten Cianjur	443.536
6	Kabupaten Cirebon	434.850
7	Kabupaten Garut	520.850
8	Kabupaten Indramayu	350.810
9	Kabupaten Karawang	344.920
10	Kabupaten Kuningan	308.582
11	Kabupaten Majalengka	328.468
12	Kabupaten Purwakarta	209.379
13	Kabupaten Subang	313.196
14	Kabupaten Sukabumi	446.400
15	Kabupaten Sumedang	316.698
16	Kabupaten Tasikmalaya	411.220
17	Kota Bandung	458.072
18	Kota Bekasi	313.589
19	Kota Bogor	214.806
20	Kota Cirebon	143.039
21	Kota Depok	239.099
22	Kota Sukabumi	134.188
23	Kota Cimahi	161.663
24	Kota Tasikmalaya	205.408
25	Kota Banjar	52.871
XIII	Provinsi Banten	198.018
1	Kabupaten Lebak	288.401
2	Kabupaten Pandeglang	300.727
3	Kabupaten Serang	372.524
4	Kabupaten Tangerang	448.770

	5	Kota Cilegon	105.298
	6	Kota Tangerang	214.108
XIV		Provinsi Jawa Tengah	549.956
	1	Kabupaten Banjarnegara	276.999
	2	Kabupaten Banyumas	404.114
	3	Kabupaten Batang	222.826
	4	Kabupaten Blora	285.250
	5	Kabupaten Boyolali	313.078
	6	Kabupaten Brebes	402.905
	7	Kabupaten Cilacap	392.866
	8	Kabupaten Demak	280.831
	9	Kabupaten Grobogan	344.330
	10	Kabupaten Jepara	276.946
	11	Kabupaten Karanganyar	284.448
	12	Kabupaten Kebumen	362.789
	13	Kabupaten Kendal	286.808
	14	Kabupaten Klaten	404.869
	15	Kabupaten Kudus	227.890
	16	Kabupaten Magelang	329.065
	17	Kabupaten Pati	337.244
	18	Kabupaten Pekalongan	253.342
	19	Kabupaten Pemalang	330.900
	20	Kabupaten Purbalingga	263.393
	21	Kabupaten Purworejo	281.270
	22	Kabupaten Rembang	215.234
	23	Kabupaten Semarang	279.060
	24	Kabupaten Sragen	306.460
	25	Kabupaten Sukoharjo	272.531
	26	Kabupaten Tegal	344.869
	27	Kabupaten Temanggung	233.303
	28	Kabupaten Wonogiri	336.549
	29	Kabupaten Wonosobo	243.974
	30	Kota Magelang	125.606
	31	Kota Pekalongan	132.335
	32	Kota Salatiga	124.117
	33	Kota Semarang	332.098
	34	Kota Surakarta	218.082
	35	Kota Tegal	178.273
XV		Provinsi DI Yogyakarta	238.692
	1	Kabupaten Bantul	308.106
	2	Kabupaten Gunung Kidul	268.325
	3	Kabupaten Kulon Progo	231.438
	4	Kabupaten Sleman	318.139
	5	Kota Yogyakarta	201.231
XVI		Prov. Jawa Timur	454.635
	1	Kabupaten Bangkalan	258.229
	2	Kabupaten Banyuwangi	398.823
	3	Kabupaten Blitar	335.944

4	Kabupaten Bojonegoro	321.111
5	Kabupaten Bondowoso	251.718
6	Kabupaten Gresik	261.283
7	Kabupaten Jember	500.843
8	Kabupaten Jombang	313.443
9	Kabupaten Kediri	380.907
10	Kabupaten Lamongan	324.917
11	Kabupaten Lumajang	283.848
12	Kabupaten Madiun	246.292
13	Kabupaten Magetan	261.901
14	Kabupaten Malang	513.563
15	Kabupaten Mojokerto	270.558
16	Kabupaten Nganjuk	318.323
17	Kabupaten Ngawi	284.397
18	Kabupaten Pacitan	222.922
19	Kabupaten Pamekasan	244.186
20	Kabupaten Pasuruan	378.252
21	Kabupaten Ponorogo	288.950
22	Kabupaten Probolinggo	279.153
23	Kabupaten Sampang	231.753
24	Kabupaten Sidoarjo	365.661
25	Kabupaten Situbondo	221.834
26	Kabupaten Sumenep	363.407
27	Kabupaten Trenggalek	256.498
28	Kabupaten Tuban	295.978
29	Kabupaten Tulungagung	320.158
30	Kota Blitar	121.252
31	Kota Madiun	207.320
32	Kota Kediri	131.453
33	Kota Malang	221.130
34	Kota Mojokerto	111.550
35	Kota Pasuruan	125.070
36	Kota Probolinggo	117.368
37	Kota Surabaya	359.520
38	Kota Batu	104.489
XVII Provinsi Kalimantan Barat		312.572
1	Kabupaten Bengkayang	139.435
2	Kabupaten Landak	175.116
3	Kabupaten Kapuas Hulu	228.587
4	Kabupaten Ketapang	280.615
5	Kabupaten Pontianak	262.388
6	Kabupaten Sambas	213.446
7	Kabupaten Sanggau	187.427
8	Kabupaten Sintang	193.276
9	Kota Pontianak	185.162
10	Kota Singkawang	131.200
11	Kabupaten Sekadau	67.308
12	Kabupaten Melawi	84.082
XVIII Provinsi Kalimantan Tengah		287.641
1	Kabupaten Barito Selatan	141.639

2	Kabupaten Barito Utara	138.902
3	Kabupaten Kapuas	223.483
4	Kabupaten Kotawaringin Barat	161.422
5	Kabupaten Kotawaringin Timur	208.462
6	Kota Palangkaraya	158.298
7	Kabupaten Barito Timur	113.134
8	Kabupaten Murung Raya	149.861
9	Kabupaten Pulang Pisau	132.211
10	Kabupaten Gunung Mas	131.156
11	Kabupaten Lamandau	108.574
12	Kabupaten Sukamara	95.933
13	Kabupaten Katingan	166.028
14	Kabupaten Seruyan	143.291
XIX	Provinsi Kalimantan Selatan	230.674
1	Kabupaten Banjar	191.629
2	Kabupaten Barito Kuala	146.618
3	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	153.812
4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	154.454
5	Kabupaten Hulu Sungai Utara	99.073
6	Kabupaten Kota Baru	122.129
7	Kabupaten Tabalong	131.960
8	Kabupaten Tanah Laut	134.568
9	Kabupaten Tapin	127.693
10	Kota Banjar Baru	118.503
11	Kota Banjarmasin	205.512
12	Kabupaten Balangan	71.533
13	Kabupaten Tanah Bumbu	83.574
XX	Provinsi Kalimantan Timur	72.547
1	Kabupaten Berau	123.949
2	Kabupaten Bulungan	170.177
3	Kabupaten Kutai	297.814
4	Kabupaten Kutai Barat	116.624
5	Kabupaten Kutai Timur	103.060
6	Kabupaten Malinau	104.034
7	Kabupaten Nunukan	81.629
8	Kabupaten Pasir	116.584
9	Kota Balikpapan	135.092
10	Kota Bontang	75.718
11	Kota Samarinda	194.482
12	Kota Tarakan	72.991
13	Kabupaten Penajam Paser Utara	31.970
XXI	Provinsi Sulawesi Utara	247.873
1	Kabupaten Bolaang Mongondow	239.965
2	Kabupaten Minahasa	141.308
3	Kabupaten Sangihe	182.538
4	Kota Bitung	131.493
5	Kota Manado	201.530
6	Kabupaten Kepulauan Talaud	126.523

7	Kabupaten Minahasa Selatan	137.597
8	Kota Tomohon	44.775
9	Kabupaten Minahasa Utara	84.082
XXII Provinsi Gorontalo		209.429
1	Kabupaten Bualemo	73.286
2	Kabupaten Gorontalo	181.354
3	Kota Gorontalo	138.105
4	Kabupaten Pohuwato	84.277
5	Kabupaten Bone Bolango	79.746
XXIII Provinsi Sulawesi Tengah		271.756
1	Kabupaten Banggai	197.394
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	131.080
3	Kabupaten Buol	124.527
4	Kabupaten Toli Toli	145.171
5	Kabupaten Donggala	238.354
6	Kabupaten Morowali	166.950
7	Kabupaten Poso	156.061
8	Kota Palu	171.947
9	Kabupaten Parigi Moutong	166.132
10	Kabupaten Tojo Una Una	70.141
XXIV Provinsi Sulawesi Selatan		332.725
1	Kabupaten Bantaeng	122.487
2	Kabupaten Barru	137.899
3	Kabupaten Bone	276.736
4	Kabupaten Bulukumba	191.275
5	Kabupaten Enrekang	140.058
6	Kabupaten Gowa	225.163
7	Kabupaten Jeneponto	162.925
8	Kabupaten Luwu	168.609
9	Kabupaten Luwu Utara	123.785
10	Kabupaten Majene	124.600
11	Kabupaten Mamuju	150.289
12	Kabupaten Maros	165.016
13	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	164.764
14	Kabupaten Pinrang	170.627
15	Kabupaten Polewali Mamasa	181.737
16	Kabupaten Selayar	119.057
17	Kabupaten Sidenreng Rappang	156.382
18	Kabupaten Sinjai	145.522
19	Kabupaten Soppeng	164.543
20	Kabupaten Takalar	149.184
21	Kabupaten Tana Toraja	212.603
22	Kabupaten Wajo	173.212
23	Kota Pare-pare	124.411
24	Kota Makassar	323.075
25	Kota Palopo	116.342
26	Kabupaten Mamasa	112.804
27	Kabupaten Luwu Timur	93.146

28	Kabupaten Mamuju Utara	47.476
XXV	Provinsi Sulawesi Tenggara	254.152
1	Kabupaten Buton	134.206
2	Kabupaten Kendari	185.291
3	Kabupaten Kolaka	154.950
4	Kabupaten Muna	205.014
5	Kota Kendari	152.933
6	Kota Bau-bau	125.237
7	Kabupaten Konawe Selatan	113.545
8	Kabupaten Bombana	59.070
9	Kabupaten Wakatobi	37.679
10	Kabupaten Kolaka Utara	48.228
XXVI	Provinsi Bali	199.924
1	Kabupaten Badung	165.685
2	Kabupaten Bangli	130.689
3	Kabupaten Buleleng	258.283
4	Kabupaten Gianyar	198.172
5	Kabupaten Jembrana	156.827
6	Kabupaten Karangasem	180.482
7	Kabupaten Klungkung	134.371
8	Kabupaten Tabanan	212.991
9	Kota Denpasar	187.085
XXVII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	249.887
1	Kabupaten Bima	203.508
2	Kabupaten Dompu	139.447
3	Kabupaten Lombok Barat	243.894
4	Kabupaten Lombok Tengah	260.804
5	Kabupaten Lombok Timur	308.859
6	Kabupaten Sumbawa	179.554
7	Kota Mataram	167.660
8	Kota Bima	118.169
9	Kabupaten Sumbawa Barat	40.269
XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Timur	299.984
1	Kabupaten Alor	153.700
2	Kabupaten Belu	194.596
3	Kabupaten Ende	166.722
4	Kabupaten Flores Timur	154.291
5	Kabupaten Kupang	213.553
6	Kabupaten Lembata	128.017
7	Kabupaten Manggarai	206.161
8	Kabupaten Ngada	161.677
9	Kabupaten Sikka	161.536
10	Kabupaten Sumba Barat	186.467
11	Kabupaten Sumba Timur	164.704
12	Kabupaten Timor Tengah Selatan	211.747
13	Kabupaten Timor Tengah Utara	158.095

14	Kota Kupang	159.274
15	Kabupaten Rote Ndao	109.644
16	Kabupaten Manggarai Barat	75.462
XXIX	Provinsi Maluku	272.775
1	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	187.310
2	Kabupaten Maluku Tengah	209.122
3	Kabupaten Maluku Tenggara	127.534
4	Kabupaten Pulau Buru	153.547
5	Kota Ambon	179.681
6	Kabupaten Seram Bagian Barat	67.664
7	Kabupaten Seram Bagian Timur	41.896
8	Kabupaten Kepulauan Aru	61.623
XXX	Provinsi Maluku Utara	226.815
1	Kabupaten Halmahera Tengah	54.286
2	Kabupaten Halmahera Barat	85.614
3	Kota Ternate	137.417
4	Kabupaten Halmahera Timur	61.610
5	Kota Tidore Kepulauan	862.996
6	Kabupaten Kepulauan Sula	63.109
7	Kabupaten Halmahera Selatan	91.146
8	Kabupaten Halmahera Utara	85.220
XXXI	Provinsi Papua	418.864
1	Kabupaten Biak Numfor	175.602
2	Kabupaten Jayapura	187.688
3	Kabupaten Jayawijaya	154.898
4	Kabupaten Merauke	277.379
5	Kabupaten Mimika	199.499
6	Kabupaten Nabire	225.313
7	Kabupaten Paniai	231.597
8	Kabupaten Puncak Jaya	214.662
9	Kabupaten Yapen Waropen	121.693
10	Kota Jayapura	186.593
11	Kabupaten Sarmi	122.833
12	Kabupaten Keerom	77.933
13	Kabupaten Yahukimo	109.740
14	Kabupaten Pegunungan Bintang	91.615
15	Kabupaten Tolikara	75.296
16	Kabupaten Boven Digoel	92.232
17	Kabupaten Mappi	103.372
18	Kabupaten Asmat	114.480
19	Kabupaten Waropen	109.012
20	Kabupaten Supiori	23.203
XXXI	Provinsi Irian Jaya Barat	128.243
1	Kabupaten Sorong	138.238
2	Kabupaten Manokwari	188.665
3	Kabupaten Fak Fak	149.497

4	Kota Sorong	152.401
5	Kabupaten Sorong Selatan	130.125
6	Kabupaten Raja Ampat	68.571
7	Kabupaten Teluk Bintuni	108.341
8	Kabupaten Teluk Wondama	41.738
9	Kabupaten Kaimana	115.859
	Total Kabupaten/Koto	79.889.041
	Total Provinsi	8.889.040
	Total Nasional	88.765.600

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO